

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Periode 2021-2024

The Effect Of Local Own-Source Revenue and Capital Expenditure On The Financial Performance Of District/City Governments In Riau Province for The 2021-2024 Period

¹M. Ilham Sapi'i*, ²Muhammad Fauzan, ³Yaswar Aprilian

^{1,2,3}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Indragiri

^{1,2,3}Jl. H.R Soebrantas, Indragiri Hilir, Riau, Indonesia

e-mail: ilham260718@gmail.com, muhammadfauzan665@gmail.com, yaswartbh18@gmail.com

(received: 29 Mei 2026, revised: 31 Mei 2026, accepted: 15 Juli 2026)

Abstrak

Studi ini mengkaji dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau tahun 2021-2024. Ketimpangan antara kenaikan nominal PAD dan belanja modal dengan rendahnya kemandirian fiskal serta masih kuatnya ketergantungan terhadap dana pusat menjadi isu utama yang diangkat. Dengan desain kuantitatif dan analisis regresi linear berganda terhadap 48 unit analisis yang mencakup seluruh 12 kabupaten/kota (total sampling), data sekunder dihimpun dari Laporan Realisasi Anggaran DJPK Kemenkeu. Kinerja keuangan direfleksikan melalui tiga proksi: rasio efisiensi, kemandirian, dan aktivitas. Temuan empiris menunjukkan bahwa secara individual, PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (t -hitung=3,995, sig.=0,000), sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan (t -hitung=1,938, sig.=0,059). Secara kolektif, keduanya terbukti berpengaruh positif signifikan (F -hitung=16,141, sig.=0,000) dengan kontribusi prediktif sebesar 41,8%. Hasil ini memperkuat perspektif keagenan, di mana pemerintah selaku agen dituntut mengoptimalkan pendapatan daerah dan membelanjakan secara produktif guna menghasilkan kinerja keuangan yang transparan dan bertanggung jawab demi kepentingan publik selaku prinsipal. Secara praktis, riset ini merekomendasikan penguatan fiskal melalui perluasan basis PAD serta peningkatan efektivitas belanja modal yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur jangka panjang.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Kinerja Keuangan, Teori Keagenan, Riau

Abstract

This study examines the impact of Local Original Revenue (PAD) and Capital Expenditure on the Financial Performance of District/City Governments in Riau Province for the 2021-2024 period. The disparity between the nominal increase in PAD and capital expenditure and the low fiscal independence as well as the continued high dependence on central government funds is the main issue raised. Using a quantitative design and multiple linear regression analysis on 48 units of analysis covering all 12 districts/cities (total sampling), secondary data were collected from the Budget Realization Reports of the DJPK Ministry of Finance. Financial performance is reflected through three proxies: efficiency ratio, independence ratio, and activity ratio. Empirical findings show that individually, PAD has a positive and significant effect on financial performance (t -count = 3.995, sig. = 0.000), while Capital Expenditure has no significant effect (t -count = 1.938, sig. = 0.059). Collectively, both variables are proven to have a positive and significant effect (F -count = 16.141, sig. = 0.000) with a predictive contribution of 41.8%. These results reinforce the agency perspective, in which the government as an agent is required to optimize regional revenues and spend productively to produce transparent and accountable financial performance for the public interest as the principal. Practically, this research

recommends fiscal strengthening through expanding the PAD base and improving the effectiveness of capital expenditures focused on long-term infrastructure development.

Keywords: Local Own-Source Revenue, Capital Expenditure, Financial Performance, Agency Theory, Riau

1 Pendahuluan

Penerapan otonomi daerah memberikan konsekuensi berupa tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Namun, masih banyak yang belum mengoptimalkan potensi sumber daya dan potensi keuangan secara maksimal. Kinerja keuangan yang optimal tidak semata-mata dievaluasi dari kapasitas membangkitkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kokoh, melainkan juga direfleksikan melalui efektivitas alokasi Belanja Modal sebagai instrumen investasi pembangunan berjangka panjang yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan esensial publik.

Provinsi Riau dikenal memiliki kekayaan alam yang berlimpah serta merupakan salah satu daerah yang memiliki kewenangan dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Fenomena saat ini yang dihadapi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau yaitu kemampuan yang kurang dalam menggali sumber potensi daerah sehingga kurangnya penyerapan pendapatan asli daerah. Hal ini meningkatkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat seperti dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini pada akhirnya berdampak langsung terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 1. 1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Rasio Efisiensi Periode 2021-2024

Tahun	Realisasi Total Belanja	Realisasi Total Pendapatan	Rasio Efisiensi
2021	8.931.704.166.450	9.383.001.507.905	95 %
2022	9.102.467.422.821,4	8.818.669.764.115,2	103 %
2023	9.867.684.585.857	9.184.418.138.301,7	107 %
2024	9.586.628.436.630,2	9.499.559.746.229,2	101 %

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data realisasi total belanja dan total pendapatan daerah selama periode 2021–2024, diketahui bahwa kinerja efisiensi keuangan pemerintah daerah menunjukkan fluktuasi yang cukup berarti. Pada tahun 2021, rasio efisiensi tercatat sebesar 95,19%, di mana nilai tersebut masih berada di bawah ambang batas 100% sehingga mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah mencapai tingkat efisiensi yang baik. Hal ini berarti realisasi belanja daerah lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Namun pada tahun 2022 (103,22%), 2023 (107,44%), dan 2024 (100,92%) rasio berada di atas 100%, sehingga tergolong tidak efisien. Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah cenderung merealisasikan belanja lebih besar dibandingkan pendapatan yang berhasil dihimpun.

Tabel 1. 2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau Periode 2021-2024

Tahun	Realisasi PAD	Kenaikan/penurunan PAD
2021	4.050.468.561.143	-
2022	4.696.769.079.910,2	16%
2023	5.376.425.650.756,7	14%
2024	5.432.109.238.736,2	1%

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa meskipun realisasi PAD Provinsi Riau secara nominal terus bertambah sepanjang periode 2021–2024, laju pertumbuhannya justru mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2022 pertumbuhan mencapai 16%, kemudian turun menjadi 14% di tahun 2023, dan merosot sangat tajam hingga hanya 1% di tahun 2024. Perlambatan ini menjadi cermin lemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber-sumber PAD. Sementara itu, PAD merupakan sumber pendanaan utama bagi belanja daerah, termasuk belanja modal. Jika pertumbuhan PAD terus melambat, maka kinerja keuangan daerah berpotensi terganggu.

Tabel 1. 3 Belanja Modal Provinsi Riau periode 2021-2024

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Kenaikan/penurunan Belanja Modal
2021	1.018.455.078.253	-
2022	1.508.534.414.100,6	48%
2023	2.009.492.924.307	33%
2024	1.887.693.923.021,9	-6%

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Mengacu pada Tabel 1.3, realisasi belanja modal Provinsi Riau menunjukkan lonjakan signifikan pada dua tahun berturut-turut, yaitu 48% (2022) dan 33% (2023), sebelum akhirnya mengalami penurunan sebesar 6% pada tahun 2024. Periode penurunan belanja modal ini bertepatan dengan kondisi perlambatan pertumbuhan PAD yang hanya tercatat 1% di tahun 2024. Pola ini memberikan indikasi bahwa terbatasnya peningkatan PAD kemungkinan besar berkontribusi terhadap pengurangan belanja modal. Padahal, pengurangan belanja modal dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian mengenai pengaruh PAD dan belanja modal terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Riau periode 2021–2024 perlu dilakukan secara empiris.

Penelitian Marizka, (2024) Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan suatu daerah dalam merealisasikan target PAD-nya, bahkan jika melebihi target, tidak secara otomatis menjamin efisiensi dan kinerja keuangan daerah yang lebih baik. Dari penelitian (Pratama *et al.*, 2024) belanja modal belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pengalokasian belanja modal. Sedangkan penelitian (Fernandes & Putri, 2022) menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini berfokus pada isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu urgensi untuk menganalisis dan memperhatikan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta alokasi Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Seperti penelitian Hastuti & Nasution, (2024) Daerah yang menjadi fokus penelitian adalah Provinsi Sumatera Utara, di mana kinerja keuangan pemerintah daerahnya menunjukkan ketidakefisienan. Hal ini disebabkan oleh perubahan dinamis dalam kondisi perekonomian, kebijakan fiskal, serta tuntutan masyarakat yang secara signifikan memengaruhi kondisi keuangan daerah tersebut. Selain itu, penurunan pendapatan asli daerah (PAD) yang terjadi secara bertahap setiap tahun di Provinsi Sumatera Utara turut berkontribusi terhadap ketidakseimbangan dalam struktur PAD daerah tersebut.

Kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat penting, sehingga masyarakat dapat berkontribusi yaitu dengan membayar pajak yang juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dari penelitian (Pratama *et al.*, 2024) belanja modal belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pengalokasian belanja modal. Sedangkan penelitian (Fernandes & Putri, 2022) menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji sejauh mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Riau selama periode 2021 hingga 2024. Hal ini didasari oleh adanya ketidakkonsistenan temuan dari berbagai penelitian terdahulu serta perlunya evaluasi yang lebih mendalam di wilayah tersebut.

2 Tinjauan Literatur

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi memandang pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Masyarakat atau publik berhak untuk menilai dan memberikan masukan serta mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang maksimal untuk kepentingan bersama. Teori ini dapat digunakan untuk pelaksanaan kinerja keuangan di lingkungan masyarakat serta pemerintahan. Teori keagenan memandang pemerintah daerah sebagai agen, bertindak sebagai prinsipal yang mewakili kepentingan masyarakat (Pratama *et al.*, 2024).

Menurut penelitian Natalia & Suprpto, (2023) Pemerintah daerah yang telah diberi wewenang untuk mengelola anggaran dari masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah dituntut untuk menjadi agen yang mampu memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat. Sebab itu, kepentingan tersebut dapat menimbulkan beberapa konflik. Hal ini menjadikan masyarakat tidak puas akan kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan pemerintah daerah lebih memilih mementingkan diri sendiri. Teori keagenan digunakan sebagai dasar untuk melihat bagaimana Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau agar lebih transparan oleh pemerintah (*agen*) untuk masyarakat sebagai *prinsipal*.

Dalam teori keagenan, kondisi *information asymmetry* di mana agen (pemerintah) memiliki informasi yang lebih banyak daripada prinsipal (masyarakat) merupakan akar dari berbagai masalah, seperti ketidakpercayaan publik. Ketimpangan ini bisa menyebabkan izin, seperti korupsi atau pengelolaan anggaran yang tidak transparan (Aulia & Rahmawaty, 2020 dikutip O. Putri *et al.*, 2025).

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Fahmi (2012) dalam kutipan (Fauzan & Rusdiyanti, 2022) menyatakan kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Menurut Sutrisno (2009) dalam penelitian (Raju Maulana *et al.*, 2024) menjelaskan tentang kinerja keuangan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Kinerja keuangan merupakan analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Fernandes & Putri, 2022) Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian penting dari pengakuan teritorial yang kemudian berperan dalam kemajuan wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam Kota. Pendapatan asli daerah adalah sejumlah uang yang didapat oleh suatu wilayah melalui pengumpulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut. Apabila pertumbuhan pendapatan daerah semakin meningkat maka juga berdampak pada kinerja keuangan daerah. Sebab peningkatan pendapatan daerah menjadikan kinerja keuangan daerah meningkat terhadap pemerintah daerah tersebut.

Belanja Modal

Menurut Halim dan Kusufi (2013) (Natalia & Suprpto, 2023) Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode. Contohnya meliputi lahan daerah, alat, mesin, gedung, sarana dan prasarana publik, bangunan pemerintah dan sebagainya yang memiliki nilai untuk waktu yang lama. Belanja modal adalah biaya dari anggaran pemerintah negara untuk mendapatkan aset permanen maupun aset lainnya yang bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat atau publik. Sebagaimana dinyatakan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja daerah digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang dimiliki oleh provinsi, kabupaten, atau kota. Ini termasuk urusan yang harus dilakukan dan pilihan, serta urusan yang dapat dilakukan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan secara hukum (Fatimah Az Zahrah *et al.*, 2023).

3 Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota se-Provinsi Riau. Lokus atau objek penelitian ini mencakup dua belas kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan mengakses data melalui portal resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (<https://djpk.kemenkeu.go.id>). Kegiatan penelitian berlangsung mulai Oktober 2025 hingga tahap akhir penyusunan laporan, meliputi proses perencanaan, pengumpulan data, analisis, dan penulisan laporan.

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan karakteristik data panel, yaitu gabungan antara data runtun waktu (*time series*) dari tahun 2021 hingga 2024 dan data silang (*cross section*) dari dua belas kabupaten/kota, sehingga menghasilkan total 48 unit observasi. Sumber data berasal dari data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Laporan Realisasi Anggaran. Populasi penelitian mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau yang berjumlah dua belas, dan karena jumlah populasi relatif kecil, maka seluruh populasi dijadikan sampel menggunakan teknik sampling jenuh (*full sampling*) tanpa adanya data yang dikeluarkan (*outlier*). Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengunduh dan mencatat data PAD dan Belanja Modal dari situs resmi Kementerian Keuangan.

Tabel 3. 1 Konsep Operasional Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Menurut Halim (2010) dalam kutipan Rohanda & Azhar, (2023) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	$PAD = PajakDaerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah + Lain - lain PAD yang Sah$	Rasio
Belanja Modal (X2)	Berdasarkan UU No.71 Tahun 2010 dikutip dalam Rosadi, (2023), Belanja Modal yaitu anggaran belanja dalam memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang mempunyai jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.	Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya.	Rasio
Kinerja Keuangan pemerintah daerah (Y)	Menurut (Nursamsia <i>et al.</i> , 2020) Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sejauh mana kegiatan keuangan daerah, termasuk pendapatan dan belanja daerah telah dilakukan dengan menggunakan indikator keuangan yang ditentukan oleh ketentuan politik atau hukum untuk suatu periode anggaran.	$Rasio Efisiensi = \frac{Realisasi Belanja}{Realisasi Pendapatan} \times 100\%$ $Rasio Kemandirian Daerah = \frac{Pendapatan Asli Daerah}{Transfer Pusat + Provinsi + pinjaman} \times 100\%$ $Rasio Aktivitas = \frac{Total Belanja Daerah}{Belanja Modal} \times 100\%$	Rasio

Sumber: Data Diolah Tahun 2026

Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan meliputi beberapa tahapan. Pertama, statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum data seperti nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, serta nilai terendah dan tertinggi. Kedua, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas untuk memeriksa distribusi residual, uji autokorelasi dengan *Run Test* (karena data bersifat *time series*), uji multikolinearitas berdasarkan nilai *tolerance*, serta uji heteroskedastisitas melalui grafik *scatterplot*. Ketiga, analisis regresi linier berganda dengan persamaan ($Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$), di mana Y merupakan kinerja keuangan daerah, X1 adalah Pendapatan Asli Daerah, dan X2 adalah Belanja Modal. Keempat, uji hipotesis yang mencakup uji parsial (uji t) untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara individual, uji simultan (uji F) untuk menguji pengaruh bersama-sama, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Seluruh pengujian dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% (0,05).

4 Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan suatu metodologi penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu permasalahan melalui serangkaian tahapan, yaitu pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data, dan analisis data. Hasil analisis deskriptif umumnya disajikan dalam bentuk tabel sederhana atau tabel frekuensi, grafik, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, serta melalui ukuran pemusatan maupun ukuran penyebaran data (Sugiyono, 2014 dikutip dalam Nurkaisen, 2025). Statistik deskriptif mencakup teknik analisis yang digunakan untuk memeriksa data yang telah terkumpul dengan mendeskripsikan data misalnya rerata, median, 107 modus, simpangan baku, dan varians, data terendah, data tertinggi tanpa bermaksud membuat kesimpulan (Sihotang, 2023).

Tabel 4. 1 Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	48	76851089348	923858966790	292281843039.79	221910593544.631
Belanja Modal	48	104081538902	1109714993117	311861585114.29	182783118607.886
Kinerjakeuangan Pemerintah Daerah	48	10340	16346	13065.90	1387.657
Valid N (listwise)	48				

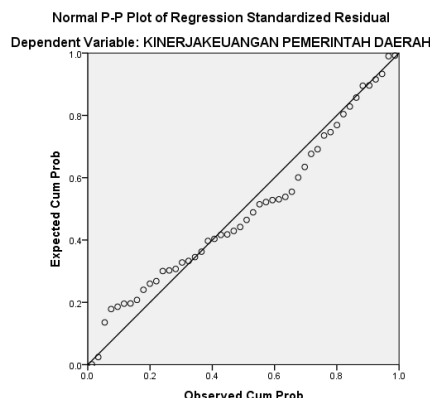
(Sumber : Output Spss Versi 23, 2026)

Berdasarkan analisis statistik deskriptif terhadap 48 observasi, variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki nilai minimum 76.851.089.348, maksimum 923.858.966.790, rata-rata 292.281.843.039,79, dan standar deviasi 221.910.593.544,631. Variabel Belanja Modal (X2) mencatat nilai minimum 104.081.538.902, maksimum 1.109.714.993.117, rata-rata 311.861.585.114,29, dan standar deviasi 182.783.118.607,886. Sementara itu, variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) memiliki nilai terendah 1,0340, tertinggi 16,346, rata-rata 13.065,90, dan standar deviasi 1.387,657. Keseluruhan data menunjukkan sebaran yang relatif tinggi di sekitar rata-rata masing-masing variabel.

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dalam konteks penelitian dilakukan untuk memverifikasi apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas dasar, pengambilan keputusan bergantung pada nilai signifikansi (sig), jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal, sedangkan jika nilai sig kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Cara untuk mendeteksi hal tersebut yaitu dengan *P-P Plot* maupun uji statistik non parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S). Distribusi dapat dikatakan normal apa bila nilai sig >0,05 (Ghozali, 2018 dalam Hastuti & Nasution, 2024).

Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas P-P Plot



(Sumber : Output Spss Versi 23, 2026)

Berdasarkan grafik P-P Plot, sebaran titik-titik data mengikuti pola garis diagonal, yang mengindikasikan bahwa data penelitian telah memenuhi asumsi normalitas. Namun, untuk memastikannya, diperlukan pembuktian lebih lanjut.

Tabel 4. 2 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

	Unstandardized Residual
N	48

Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1058.88102435
Most Extreme Differences	Absolute	.111
	Positive	.111
	Negative	-.111
Test Statistic		.111
Asymp. Sig. (2-tailed)		.188 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

(Sumber : Output Spss Versi 23, 2026)

Berdasarkan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi 0,188 (>0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan telah memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini menggunakan alat uji *run test* sebagai alat uji autokorelasi. Uji *Run-test* adalah bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak (Burhan *et al.*, 2022). Berdasarkan kriteria Uji Run (*Run Test*), residual dikatakan bersifat acak apabila nilai signifikansi (*p-value*) yang dihasilkan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pola autokorelasi dalam residual model.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-127.27547
Cases < Test Value	24
Cases >= Test Value	24
Total Cases	48
Number of Runs	22
Z	-.729
Asymp. Sig. (2-tailed)	.466

a. Median

(Sumber : Output Spss Versi 23, 2026)

Berdasarkan uji Run Test, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,466 (>0,05), sehingga hipotesis residual bersifat acak diterima dan disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian.

Hasil Uji Multikoleniaritas

Menurut Sihotang, (2023) Uji multikoleniaritas bertujuan mengetahui apakah variabel-variabel bebas dalam penelitian memiliki unsur-unsur yang sama. Dikatakan multikoleniaritas apabila nilai tolerance < 10 atau nilai tolerance > 0,10 maka multikoleniaritas (Rosadi, 2023).

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikoleniaritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11568.838	327.734		35.299	.000		
	Pendapatan Asli Daerah	3.145E-9	.000	.503	3.995	.000	.816	1.225
	Belanja Modal	1.853E-9	.000	.244	1.938	.059	.816	1.225

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

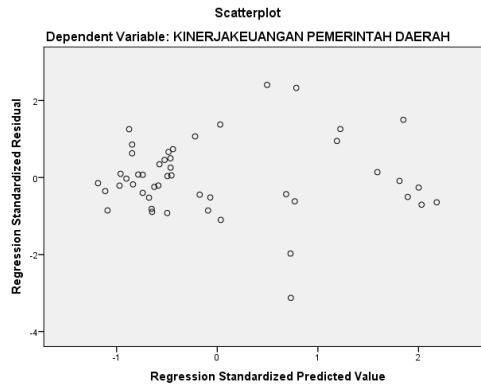
(Sumber : Output Spss Versi 23, 2026)

Berdasarkan Tabel 4.8, nilai VIF untuk semua variabel independen adalah 1,225 (<10) dan nilai Tolerance 0,816 (>0,10), sehingga disimpulkan model regresi terbebas dari multikoleniaritas.

Hasil Uji Heterokedastitsitas

Menurut Sihotang, (2023) Uji heteroskedastisitas adalah penilaian mendasar yang harus dipenuhi dalam konteks analisis regresi. Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang dilakukan untuk menganalisis apakah terdapat ketidaksamaan atau tidak pada varian. Dalam uji heteroskedastisitas untuk membuktikannya dengan cara melihat grafik scatterplot. Heteroskedastisitas tidak terjadi apabila scatterplot tidak membentuk pola dan hanya mengandung titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y (Veny, dkk 2019 dalam penelitian Rosadi, 2023).

Tabel 4. 5 Hasil Uji Heterokedastisitas



(Sumber : Output Spss Versi 23, 2026)

Berdasarkan *scatterplot*, titik-titik residual tersebar acak di atas dan di bawah angka nol tanpa pola tertentu, mengindikasikan varians residual homogen. Dengan demikian, model regresi terbebas dari heteroskedastisitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Hasil Uji Regeresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan tujuan untuk mengetahui arah dan besaran pengaruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

- Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- X_1 = Pendapatan Asli Daerah
- X_2 = Belanja Modal
- ϵ = Error Term Model

Tabel 4. 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11568.838	327.734		35.299	.000
	Pendapatan Asli Daerah	3.145E-9	.000	.503	3.995	.000
	Belanja Modal	1.853E-9	.000	.244	1.938	.059

a. Dependent Variable: Kinerja keuangan Pemerintah Daerah

(Sumber : Output Spss Versi 23, 2026)

$$Y = 11568.838 + (3.145E-9)X_1 + (1.853E-9)X_2 + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi, konstanta sebesar 11.568,838 menunjukkan bahwa jika PAD dan Belanja Modal bernilai nol, maka kinerja keuangan diprediksi sebesar 11.568,838 satuan. Koefisien PAD (3,145E-9) dan Belanja Modal (1,853E-9) masing-masing mengindikasikan bahwa setiap

peningkatan satu unit pada masing-masing variabel akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar nilai koefisien tersebut, dengan asumsi variabel lain tetap. Secara keseluruhan, kedua variabel memberikan kontribusi positif meskipun pengaruh marginalnya relatif kecil, sehingga perlu dikonfirmasi lebih lanjut melalui uji hipotesis.

Uji Hipotesis Parsial T

Uji parsial (Uji t) bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Apabila nilai $t < 0,05$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11568.838	327.734		35.299	.000
	Pendapatan Asli Daerah	3.145E-9	.000	.503	3.995	.000
	Belanja Modal	1.853E-9	.000	.244	1.938	.059

a. *Dependent Variable:* Kinerja keuangan Pemerintah Daerah

(Sumber : Output Spss Versi 23, 2026)

Berdasarkan uji t pada Tabel 4.7, variabel Pendapatan Asli Daerah (t hitung 3,995 > 0,05; sig. 0,000 < 0,05) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau periode 2021–2024. Sementara itu, variabel Belanja Modal (t hitung 1,938 > 0,05; sig. 0,059 > 0,05) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada periode yang sama.

Uji Hipotesis Simultan {Uji F}

Tujuan penerapan uji F adalah untuk mengevaluasi kelayakan model regresi secara keseluruhan, serta menguji apakah model yang diajukan telah memenuhi asumsi kecocokan dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Faktor independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara kolektif jika kemungkinan (signifikansi) lebih besar dari 0,05. Faktor-faktor independen tersebut secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen jika probabilitasnya kurang dari 0,05 (Nur & Zuwardi, 2024).

Tabel 4. 8 Hasil Uji Simultan F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	37805094.364	2	18902547.182	16.141	.000 ^b
	Residual	52697764.116	45	1171061.425		
	Total	90502858.479	47			

a. *Dependent Variable:* Kinerja keuangan Pemerintah Daerah

b. *Predictors:* (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah

(Sumber : Output SPSS Versi 23, 2026)

Berdasarkan uji F, diperoleh nilai signifikansi 0,000 (<0,05) dan F hitung 16,141 > F tabel 3,20, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau periode 2021–2024.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tujuan penghitungan koefisien determinasi (R^2) adalah untuk menilai sejauh mana model regresi mampu menjelaskan variasi atau keragaman dari variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2016 dalam penelitian Rahmadina, 2024).

Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.646 ^a	.418	.392	1082.156	1.638

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

(Sumber : Output SPSS Versi 23, 2026)

Berdasarkan Tabel 4.9, nilai R^2 sebesar 0,418 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 41,8%, sedangkan sisanya 58,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam model.

Hasil Pembahasan

Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Periode 2021-2024

Berdasarkan uji t dengan SPSS versi 23, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau periode 2021–2024, dengan t-hitung 3,995 > 0,05 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil ini mendukung hipotesis pertama (H1) secara empiris. Konstanta regresi sebesar 11.568,838 menunjukkan tingkat dasar kinerja keuangan saat PAD bernilai nol, sementara koefisien PAD sebesar 3,145E-9 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu unit PAD akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar nilai tersebut, meskipun kontribusinya tergolong minimal. Secara teori keagenan, pemerintah daerah sebagai agen bertanggung jawab mengoptimalkan kinerja keuangan dengan menggali potensi pendapatan secara transparan dan akuntabel, sementara masyarakat sebagai prinsipal berperan dalam pengawasan, sehingga diperlukan tata kelola yang baik untuk mengatasi asimetri informasi dan konflik kepentingan demi kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini juga didukung serta diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Fernandes & Putri, 2022) dengan judul penelitian pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah pada 19 kabupaten/kota provinsi sumatera barat tahun 2017-2020 menjelaskan hubungan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan hasil penelitian menjelaskan bahwa peningkatan jumlah PAD akan menyebabkan peningkatan pada kinerja keuangan daerah terhadap Kabupaten/Kota.

Belanja Modal Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Periode 2021-2024

Berdasarkan uji t dengan SPSS versi 23, variabel Belanja Modal terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau periode 2021–2024, dengan nilai t-hitung 1,938 dan signifikansi 0,059 > 0,05. Dengan demikian, hipotesis (H2) yang menyatakan adanya pengaruh positif Belanja Modal ditolak secara empiris. Konstanta regresi sebesar 11.568,838 menunjukkan tingkat dasar kinerja keuangan saat belanja modal bernilai nol, sementara koefisien belanja modal sebesar 1,853E-9 mengindikasikan peningkatan yang sangat kecil (meskipun positif) terhadap kinerja keuangan. Dalam perspektif teori keagenan, belanja modal seharusnya menjadi wujud komitmen agen terhadap prinsipal, namun rentan terhadap konflik kepentingan dan asimetri informasi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dari masyarakat dan lembaga terkait agar belanja modal selaras dengan kepentingan publik dan mencerminkan akuntabilitas agen.

Penelitian ini didukung penelitian (Fernandes & Putri, 2022) Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2017-2020. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung belanja modal sebesar 0,182265 (< t-tabel 1,66600) dan probabilitas 0,8559 (> 0,05). Meskipun koefisien regresinya positif (0,006880), pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian di mana belanja modal juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah (t-hitung 1,938, sig. 0,059 > 0,05). Dengan demikian, kedua studi di Provinsi Sumatera Barat dan Riau periode berbeda mendukung kesimpulan yang sama bahwa belanja modal secara parsial tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Periode 2021-2024

Berdasarkan uji simultan, nilai signifikansi 0,000 ($<0,05$) dan F hitung 16,141 $>$ F tabel 3,20, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau periode 2021–2024, mendukung hipotesis (H3). Persamaan regresi $Y = 11.568,838 + (3,145E-9)X_1 + (1,853E-9)X_2$ menunjukkan kedua variabel memiliki pengaruh positif meskipun sangat kecil. Nilai R Square sebesar 0,418 berarti kedua variabel mampu menjelaskan 41,8% variasi kinerja keuangan, sisanya 58,2% dijelaskan faktor lain. Dalam perspektif teori keagenan, PAD yang tinggi mencerminkan keberhasilan pemerintah sebagai agen mengoptimalkan sumber daya lokal, sedangkan belanja modal yang efektif menunjukkan komitmen membangun aset publik untuk kesejahteraan masyarakat selaku prinsipal.

5 Kesimpulan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan fiskal di Provinsi Riau, di mana PAD dan belanja modal secara nominal meningkat namun kemandirian fiskal masih di bawah 30% dengan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat, mencerminkan potensi konflik keagenan. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi linear berganda pada 48 unit analisis (12 kabupaten/kota selama 4 tahun), hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah terbukti berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai t-hitung 3,995 serta signifikansi 0,000, sedangkan variabel Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan secara parsial dengan nilai t-hitung 1,938 dan signifikansi 0,059. Namun secara simultan, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi 0,000 dan F hitung 16,141 $>$ F tabel 3,20. Temuan ini mendukung agency theory bahwa pemerintah daerah sebagai agen bertanggung jawab memaksimalkan PAD dan mengalokasikan belanja modal secara produktif untuk mewujudkan kinerja keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel demi kepentingan publik sebagai prinsipal.

Saran

Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau, disarankan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, menggali sumber pendapatan baru dari sektor unggulan serta BUMD, dan melakukan diversifikasi pendapatan khususnya bagi daerah yang bergantung pada sektor migas. Belanja modal harus diprioritaskan pada infrastruktur aset tetap yang berdampak jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, ruang publik, dan konektivitas dengan perencanaan dan penganggaran yang transparan serta akuntabel. Dalam peningkatan kinerja keuangan, daerah dengan KKPD rendah perlu mengevaluasi komponen rasio efisiensi, kemandirian, dan aktivitas, serta kapasitas aparatur pengelola keuangan perlu ditingkatkan melalui pelatihan agar pengelolaan anggaran lebih profesional dan berorientasi hasil.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan model dengan menambah variabel lain seperti pendapatan transfer dana pusat, belanja pegawai, dana transfer daerah, belanja barang dan jasa, serta pembiayaan daerah agar analisis lebih komprehensif. Selain itu, indikator kinerja keuangan daerah juga perlu dikembangkan dengan rasio lain seperti rasio efektivitas.

Referensi

- [1] Burhan, M., Kartini, & Said, D. (2022). Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. 18, 296–310.
- [2] Fauzan, M., & Rusdiyanti, D. (2022). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Alur Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkah Amanah (Studi Kasus Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu). *Ejournal.Unisi.Ac.Id*, 8(2), 102–117. <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/jam/article/view/2419/1347>
- [3] Fernandes, J., & Putri, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 198–209. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.102>
- [4] Hastuti, N. S., & Nasution, D. A. D. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja

- Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 24(2), 157–170. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan>
- [5] Marizka, A. (2024). Pengaruh Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2023).
- [6] Natalia, N., & Suprpto, W. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(2), 303–318. <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i2.2985>
- [7] Nur, F., & Zuwardi. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2022. *Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis*, 2(10), 1303–1322.
- [8] Nurkaisan, M. R. (2025). Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Dengan Literasi Keuangan Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Manajemen Feb Universitas Islam Indragiri) (Vol. 1, Issue 1).
- [9] Nursamsia, A. Dahri Adi Patra Ls, S.E., M. S., & Hadrah, S.E., M. S. (2020). Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 – 2020.
- [10] Pratama, D. P., Mustika, I. G., & Karpriana, A. P. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2013-2022. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.*, 8(4), 720–732. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v8i4.1609>
- [11] Putri, O., Yantiana, N., & Desyana, G. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Transfer Pemerintah Pusat Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kalimantan Jimea | Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi). 9(2), 2362–2384.
- [12] Rahmadina, S. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Dana Perimbangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun Periode 2017-2021.
- [13] Ramadani, T. D., Maulana, R., & Hidayanti, S. (2024). Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Metode Du Pont System pada Pt. Telkom Indonesia (Persero) Tbk Periode Tahun 2018-2022. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi Bisnis JMEB*, 1(1), 20–29.
- [14] Rohanda, A., & Azhar, I. (2023). Pengaruh Belanja Modal , Pendapatan Asli Daerah , Dan Dana Alokasi Umum Terhadap (Studi Pada Kabupaten Aceh Tamiang). 4, 287–301.
- [15] Rosadi, H. (2023). PPengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Ukuran Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Di Nusa Tenggara Barat Tahun 2017- 2021).
- [16] Sihotang, H. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif. In M. P. Dr. Erni Murniarti (Ed.), *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Cetakan I). UKI PRESS.